

EKSISTENSI KAUM BANGSAWAN DALAM BIROKRASI DI KABUPATEN BONE

Andi St. Aisyah

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
email: andiaisyah74@gmail.com

Abstract

Based on the results of the study show that, (1) nobles can be distinguished from other communities by looking at the embedding of the title of Andi in front of his name, but not only that. Nobility also has four qualities that must be possessed in the nobility of Lempu, Getteng, and Temmappasilaingeng. In addition, nobles also have a gentle and respectful attitude towards others; (2) the nobility still wants to maintain and continue the legitimacy of the leadership in Bone Regency which was inherited by the previous Kings of Bone, because the democratic space of the community is wide for anyone who is competent and capable of being able to occupy a position at the bureaucratic level of Bone Regency. the public that the leader in Bone must be from the descendants of the nobility or descendants of the previous kings to create justice in the midst of society; (3) bureaucratic conditions in terms of kin relations "are still very thick". This is because the condition of the bureaucracy is still filled with a series of noble names, but neither the nobility nor the people involved in the recruitment of bureaucracy is only looking at the status of relatives but is chosen through a recruitment process that prioritizes the ability and capability to become candidates for officials in Bone's bureaucracy (4) The presence and dominance of nobles in the bureaucracy in Bone regency, and the existence of nobles in the bureaucracy of Bone Regency were apparently due to the aristocratic strategy itself, awareness of the nobility who realized that they had the lineage of respected and respected leaders so motivated to follow trace the steps. Also adhering to the principle of nobility of his ancestors was used as a guideline in his life so that his honor and being able to be respected as a nobility remained in his possession.

Keywords: Existence, Nobility, Bureaucracy

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) bangsawan dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya dengan melihat penyematan gelar *Andi* didepan namanya, namun bukan hanya itu saja. Bangsawan juga memiliki empat sifat yang harus dimiliki dalam diri bangsawan yaitu *Lempu*, *Getteng*, dan *Temmappasilaingeng*. Selain itu, bangsawan juga memiliki sifat yang lemah lembut dan menghargai orang lain; (2) kaum bangsawan masih ingin mempertahankan dan melanjutkan legitimasi kepemimpinan di Kabupaten Bone yang diwariskan oleh raja-raja Bone terdahulu, karena ruang demokratis masyarakat sudah luas bagi siapapun yang berkompeten dan berkemampuan mampu untuk menjabati kedudukan di tataran birokrasi Kabupaten Bone, timbul kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa pemimpin di Bone harus berasal dari keturunan bangsawan atau keturunan raja-raja terdahulu untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat; (3) kondisi birokrasi ditinjau dari hubungan kerabat "masih sangat kental". Hal ini dikarenakan kondisi birokrasi masih diisi dengan sederet nama bangsawan , namun bangsawan ataupun orang-orang yang terlibat dalam hal perekrutan birokrasi tidaklah dilakukan hanya dengan melihat status kerabatnya melainkan dipilih lewat proses perekrutan yang mengedepankan nilai kemampuan dan kapabilitasnya menjadi calon pejabat di birokrasi Kabupaten Bone; (4) Hadir dan mendominasinya bangsawan dalam birokrasi di kabupaten Bone, serta mampu tercipta eksistensi bangsawan dalam birokrasi Kabupaten Bone ternyata disebabkan oleh strategi bangsawan itu sendiri, kesadaran kaum bangsawan yang menyadari bahwa dirinya memiliki garis keturunan dari pemimpin yang terhormat dan disegani sehingga termotivasi untuk mengikuti jejak langkahnya. Dengan menganut pula prinsip kebangsawanannya leluhurnya dijadikan pedoman dalam hidupnya sehingga kehormatan dan mampu disegani sebagai kaum bangsawan tetap dimilikinya.

Kata Kunci: Eksistensi, Bangsawan, Birokrasi

A. Pendahuluan

Secara politis, Indonesia adalah sebuah Negara. Di sisi lain, secara antropologis Indonesia juga merupakan sebuah bangsa. Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang tentu saja bertujuan untuk mengatur atau menguasai. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki kultur yang beragam, sebagaimana kultur/budaya adalah sebuah cara hidup manusia. Sama halnya dengan apa yang terjadi di tataran daerah yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Bone sebagai sebuah daerah yang lekat dengan kultur/budayanya yang ada hingga saat ini.

Kekuasaan pusat pada Kerajaan Bone secara historis dan budaya tergantung pada mitos raja *To Manurung* sebagai legitimasi atas kekuasaannya. Raja dan pengganti-penggantinya semuanya mengacu pada mitos tersebut. Meskipun diakui bahwa alam demokrasi telah hidup pada masa lalu dikerajan ini, namun patut dicatat bahwa seluruh raja yang berkuasa dikerajaan ini memiliki hubungan darah dengan raja pertama sebagaimana yang dikatakan dalam buku sejarah Bone.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan sistem pemerintahan yang tadinya sudah menjadi penerimaan umum di Kerajaan Bone bahwa raja pertama di kerajaan ini adalah *To Manurung* atau yang turun dari langit serta raja penggantinya dipercaya sebagai keturunan langsung dari raja pertama yang bergelar *Arung Pone* (raja dipusat Bone) atau *Petta MangkauE* (raja yang berkuasa dan duduk di atas tahta kerajan), dan proses pengangkatan raja diangkat atas dasar musyawarah dan mufakat oleh Dewan adat sesuai dengan aristokrasi atau demokrasi. Namun setelah Pemerintah Hindia Belanda menguasai kerajan ini, raja diangkat oleh

Pemerintah Hindia Belanda sesuai perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1860. (Hamid, 2007; Patunru, 1989)

Fenomena dinasti politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya Pemilukada langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2001. Seiring dengan berjalannya kedua proses tersebut sebagai wujud demokratisasi di aras lokal, berbagai elit bermunculan di daerah untuk mengkooptasi kedua proses tersebut. Kemunculan para elit dalam demokrasi lokal tersebut lazim dikenal dalam istilah reorganisasi kekuasaan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi.

Dalam hal ini sistem politik pemerintahan di daerah terkesan dinasti politik, yang merupakan cerminan bentuk politik kekuasaan pada masa lampau, seperti yang diuraikan penulis sebelumnya bahwa di Kerajaan Bone seluruh raja yang berkuasa memiliki hubungan darah dengan raja yang pertama sehingga saat ini hubungan darah bangsawan masih menjadi wacana dalam kontestasi politik di Kabupaten Bone.

Hal ini menarik minat dan rasa keingintahuan saya, untuk meneliti bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana bangsawan masih terus mendominasi birokrasi dikabupaten Bone mengingat zaman kerajaan telah lama beralih ke sistem pemerintahan dan tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selain itu, pendidikan pada masa sekarang ini, sudah bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa orang yang notabene bukan bangsawan atau non-bangsawan bisa memiliki pendidikan yang sama sehingga juga mampu memiliki kecerdasan dan kemampuan yang sama

dalam hal memegang jabatan pemerintahan. Artinya kesempatan antara seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi pemimpin daerah adalah sama.

Penelitian ini tidak bermaksud untuk membeberkan secara panjang lebar dan mendalam seluruh proses sejarah perkembangan sistem politik di Kabupaten Bone, tetapi lebih membatasi diri pada salah satu aspek sistem politiknya, yaitu mengenai golongan elite kaum Bangsawan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan orang yang bekerja di tataran birokrasi di Kabupaten Bone, Tokoh masyarakat yang merupakan orang-orang yang di tuakan atau dihormati dan masyarakat yang terlibat dalam suatu birokrasi di kabupaten Bone. *Key person* atau orang kunci dalam penelitian ini adalah bangsawan yang tergabung dalam birokrasi.

B. Bangsawan Bone Beserta Karakteristiknya

Kasta berasal dari bahasa Portugis *casta* yang berarti pembagian masyarakat. Kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang-tukang atau orang-orang ahli dalam bidang tertentu. Seperti halnya kasta-kasta di Kabupaten Bone merupakan hasil penyusunan yang menjadi ketentuan atau pengaturan (Wari) yang telah ditetapkan raja Bone dimasa pemerintahan *Lapatau Matanna Tikka Matinroe ri Nagauleng* (Raja Bone ke-16) sekitar tahun 1696-1714 M. sejak itulah susunan dan tingkatan derajat bangsawan di Bone diberlakukan bahkan masih ada sampai sekarang. (Mappangara, 1996; Mappangara and Abbas, 2003; Poelinggomang and Mappangara, 2003)

Pembagaian kasta ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religious dari masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Di dalam buku *Latoa* (kumpulan dari sabda-sabda dan petuah-petuah dari raja-raja dan orang-orang cerdik pandai dahulu kala) dikatakan, bahwa memelihara dan mempertahankan kasta-kasta adalah salah satu syarat untuk menjadikan sebuah negeri menjadi besar. Dikatakan selanjutnya bahwa kemakmuran sebuah negeri adalah bergantung dari empat perkara, yang mana setelah agama islam masuk ke Bone ini ditambahkan dengan apa yang disebut *sara*. Dalam kehidupan kebudayaan, geliat dan gairahnya tumbuh dalam berbagai bentuk. (Makkello, n.d.)

Adapun beberapa Kasta-kasta yang terdapat di Kabupaten Bone dapat diperinci atas tiga kasta utama, yaitu :

1. Anak Arung (anak raja-raja)
2. To-Maradeka (orang-orang merdeka/orang-orang biasa atau kebanyakan)
3. Ata (hamba-sahaya atau budak)

Kasta Arung terbagi dalam golongan-golongan, yaitu :

1. Anak Arung Matasa' (anak raja/putera-puteri mahkota yang masak/murni darahnya), yaitu ayah dan ibunya anak arung matasa', baik yang berketurunan dari kerajaan Bone sendiri maupun yang berketurunan dari kerajaan-kerajaan lain yang dinilai sederajat/setinggi dengan Bone, antara lain : Luwu, Gowa, Wajo, Soppeng dan Sidenreng. (golongan ini disebut ana'-Pattola, yang berhak penuh menggantikan raja).
2. Arileng atau Anak Manrapi, yaitu anak yang lahir dari : Bapak, dari kasta golongan Anak Arung Matasa. Ibu, dari kasta golongan yang tingkatnya atau

darahnya menurun (tidak sama dengan suaminya), yang biasa disebut Rajeng. Golongan ini dapat diangkat menjadi raja bilamana tidak ada Anak-Pattola, karena Anak-Pattola dianggap tidak cakap untuk menduduki tahta kerajaan).

3. Rajeng, yaitu anak lahir dari : Bapak, dari Kasta golongan anak arung Matasa atau anak Manrapi. Ibu dari kasta/golongan yang tingkatnya/derajatnya menurun (jauh beda dengan suaminya, yang lazim disebut Cera-Ciceng atau anak arung sипу-Е (bangsawan separuh, anak cera', bangsawan campuran).
4. Anak Arung SipuE (bangsawan Separuh), yaitu anak yang lahir dari : Bapak kasta golongan anak Arung Matasa atau anak Manrapi. Ibu dari kasta golongan To-Maradeka (orang yang merdeka/orang biasa atau kebanyakan).
5. Anak Ce-ra' (bangsawan campuran), yaitu anak yang lahir dari : Bapak dari kasta golongan anak arung SipuE. Ibu dari kasta golongan To-Maradeka (orang merdeka/orang biasa /kebanyakan ataupun budak).

Kasta To-Maradeka terbagi dalam golongan :

1. To-Deceng (orang baik-baik).
2. To-Sama'/To-Maradeka (biasa atau kebanyakan/orang-orang yang merdeka). Kasta Ata terbagi dalam golongan :
 1. Ata-mana (hamba sahaya warisan)
 2. Ata-mabuang (hamba sahaya baru). (Mattulada, 1998, 1994, 1975)

Berdasarkan jawaban dari salah seorang informan saya mengatakan bahwa: "idi sebagai Arung'e ndi bukan cuma *asetta nita tau'we* tapi haruski punya sifat-sifat *akkarungeng*. Dimana haruski menjunjung tinggi yang namanya *lempu, getteng, ada tongeng* dan *temmapasilaingang*." Dari data

tersebut menyebutkan bahwa jika hanya bermodalkan nama bangsawan itu saja tidak cukup untuk menunjang kebangsawanannya itu sendiri. Tapi ada sifat-sifat yang juga harus dimiliki dalam diri seorang bangsawan/raja/pemimpin.

Dalam Kehadiran *To Manurung* sebagai sosok dengan berbagai kelebihan, pada saat itu pula muncul bertepatan pada saat titik klimaks setiap kelompok yang bertikai untuk berhenti saling bertempur. Kehadiran *To Manurung* yang dikisahkan dengan begitu dramatis dalam *Lontara*. (Mattulada, 1975) Dan terbentuknya pelapisan sosial di Kabupaten Bone akhirnya dikenal dengan sebutan Bangsawan. Dimana bangsawan memiliki hal yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa bangsawan dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya dengan melihat penyematan gelar *Andi* di depan namanya, namun bukan hanya itu saja. Bangsawan juga memiliki empat sifat yang harus dimiliki dalam diri bangsawan yaitu *lempu, getteng, ada tongeng* dan *temmapasilaingang* serta sifat lemah lembut dan sopan yang dimiliki oleh seorang bangsawan.

C. Keterlibatan Bangsawan dalam Birokrasi Bone

Bangsawan di Kabupaten Bone juga sangat dikenal dengan keterlibatannya di dalam birokrasi di Kabupaten Bone. Tak jarang kita mendengar atau menjumpai poster maupun mendengar nama-nama yang terjun ke dunia politik atau bekerja di birokrasi Kabupaten Bone berasal dari kalangan kaum bangsawan. Hal ini sudah tergambar dengan jelas dari beberapa dekade sebelumnya dan masih bertahan hingga saat ini.

Berdasarkan dari penelitian saya dilapangan menghasilkan bahwa keterlibatan kaum bangsawan dalam birokrasi di Kabupaten Bone memiliki beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya

1. Sadar Akan Asal-usulnya

Kaum bangsawan melibatkan dirinya dalam birokrasi di Kabupaten Bone dikarenakan kaum bangsawan yang ada sekarang ini di Kabupaten Bone menyadari betul asal-usulnya dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya. Kaum bangsawan berasal dari keturunan raja-raja Bone terdahulu. Dengan kata lain, kaum bangsawan di Bone merupakan keturunan pemimpin-pemimpin di Bone pada zamannya. Dan sebagai bentuk penghargaan serta kesyukuran atas warisan mulia dari leluhurnya hingga mereka dijuluki bangsawan di Bone akhirnya terlecut hatinya untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsawanannya tersebut. Sehingga di Bone dikenal dengan istilah *abbatireng* atau *ajjuareng* atau *wija To-Mapparenta*, yang artinya dapat saya artikan atau maknai sebagai kesadaran penuh akan apa yang ada didiri seorang bangsawan yakni didirinya terpatri atau mengalir darah dari seorang pemimpin yang sangat dihormati dan disegani. Atau singkatnya, keturunan dari darah seorang pemimpin.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan saya, "kita yang dianugerahkan gelar Bangsawan dari leluhur kenapa kemudian kita mau masuk di dunia birokrasi di Kabupaten Bone, itu karena ada yang disebut dengan *abbatireng/ajjuareng/wija To-Mapparenta*. Dimana sejak kita lahir sudah ada ditanamkan nilai-nilai kepemimpinan karena nenekta atau kakekta

itu adalah pemimpin terdahulu atau raja di Kabupaten Bone. Kita sebagai *wijanna* atau keturunannya itu yang menjadi motivasi positif juga untuk kita supaya melanjutkan kepemimpinan itu". (HN, 2019)

2. Kepercayaan Masyarakat yang Masih Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Adat dan Budaya Serta Sejarah Bone

Bukan hanya bangsawan itu saja yang menganggap harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan namun sebagian masyarakat yang masih memiliki pemikiran lokal pun menjadikan keturunan merupakan salah satu syarat dalam menilai dan menentukan sebuah pemimpin atau yang terlibat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Bone. Dengan kata lain, masyarakat melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut benar-benar bangsawan yang mempunyai garis keturunan pemimpin atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan saya " sekarang memang sudah bisa semua orang mencalonkan jadi kepala desa ndi, tapi saya pribadi tetap ka percaya sama Arung artinya kalau masih ada Arung yang bisa memimpin kenapa tidak. Contoh mi di desa ini ndi, yang kepala desa ini sekarang cucunya dari kepala desa sebelumnya dan Alhamdulillah masih aman dirasa desa dan tidak adai masalah apa-apa." (HN, 2019)

3. Ruang Demokratis Terbuka Luas

Setiap masyarakat yang memiliki kapabilitas dan ingin berpartisipasi dalam birokrasi di Kabupaten Bone tidaklah ada batasan baik dari kalangan bangsawan maupun non bangsawan. Hal inipun kemudian dibenarkan oleh salah satu

informan saya juga mengatakan bahwa "Sekarang itu sudah demokratis ndi, siapapun yang mau masuk menjadi pejabat di birokrasi Kabupaten Bone bisa saja. Yang penting dia memiliki kapabilitas yang cukup, baik itu dari bangsawan ataupun bukan dari golongan bangsawan. Terserah masyarakatsa yang mau dan mampu". (AL, 2019)

Dari data diatas menyebutkan bahwa sebenarnya siapapun yang ingin melibatkan dirinya dalam sebuah tatanan birokrasi di Kabupaten Bone tidaklah ada batasan baik dia berasal dari golongan bangsawan maupun bukan dari golongan bangsawan selama memiliki kemauan dan kemampuan yang mumpuni. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan keterlibatan bangsawan dalam birokrasi di Kabupaten Bone.

D. Kondisi Birokrasi Bone Ditinjau dari Hubungan Kerabat

Melihat kondisi birokrasi di Kabupaten Bone saat ini ditinjau dari hubungan kerabat berdasarkan hasil penelitian saya mengatakan "masih sangat kental". Artinya, birokrasi di Kabupaten Bone berdasarkan data dan hasil pengamatan selama penelitian dilapangan membuktikan bahwa birokrasi diisi oleh sebagian besar kaum bangsawan dan memiliki kekerabatan antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya atau masih dari keturunan raja-raja Bone atau bangsawan Bone terdahulu.

Namun hasil penelitian saya membenarkan pula bahwa dalam proses perekrutan tidak serta merta hanya berdasarkan kekerabatan melainkan karena kemampuan pejabat birokrasi itu sendiri. Hal ini diutarakan oleh beberapa informan saya pada saat wawancara dan mengatakan "Saya

ini direkrut menjadi pejabat yang bekerja di kantor Bupati ini atau birokrasi ini itu tidak langsung ndi, meskipun saya juga bangsawan tapi samaji dengan pegawai lainnya yang bukan bangsawan harus dulu melalui prosedural-prosedural yang ada dan sesuai aturan berlaku dan harus memenuhi syarat. Kalau dibilang karena hubungan kekerabatan itu penilaian terakhir bahkan tidak bisa sebenarnya masuk penilaian".(AL, 2019) Dari data di atas mengatakan bahwa proses perekrutan pejabat di birokrasi kabupaten Bone tidaklah serta merta, namun harus melalui proses-proses pemilihan lewat syarat yang ada dan siapapun itu harus melalui dan menaati syarat serta ketentuan yang ada. Sehingga penilaian kekerabatan itu bukanlah menjadi faktor yang sangat mendukung sehingga dapat direkrut namun tidak terlepas dari kemampuannya sendiri.Oleh karena itu, penilaian kekerabatan juga dapat dikatakan tidak terlalu berpengaruh. Hal ini dibuktikan bahwa masih adanya pejabat birokrasi yang bukan dari golongan kaum bangsawan. Mereka diberi jabatan birokrasi berdasarkan kualifikasi atau kemampuan mereka sendiri.Maka, jika hingga hari ini tatanan birokrasi di Kabupaten Bone masih didominasi oleh bangsawan itu disebabkan oleh kemampuan dalam diri bangsawan itu sendiri.

Kesimpulannya ialah kondisi birokrasi ditinjau dari hubungan kerabat pada dasarnya masih sangat kental dibuktikan dengan kondisi birokrasi yang diisi oleh sederet nama bangsawan, namun bangsawan ataupun orang-orang yang terlibat dalam hal perekrutan birokrasi tidaklah dilakukan hanya dengan melihat status kerabatnya melainkan dipilih lewat proses perekrutan yang mengedepankan

nilai kemampuan dan kapabilitasnya menjadi calon pejabat di birokrasi Kabupaten Bone.

E. Strategi Eksistensi Kaum Bangsawan dalam Pucuk Birokrasi Bone

Terkait eksistensi kaum bangsawan dalam kehidupan birokrasi di Kabupaten Bone memang menyisakan tanda tanya yang besar. Mengapa hal ini bisa terjadi dan berlangsung terus-menerus. Maka dari itu peneliti dalam hal ini fokus pada pencarian informasi mengenai strategi-strategi kaum bangsawan dalam mempertahankan eksistensi di kehidupan Birokrasi pemerintahan Kabupaten Bone. Dari hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti menemukan informasi yang dicari yakni:

1. Warisan dari Strategi Pemerintahan pada Masa Kerajaan.

Pada masa kerajaan, kerajaan Bone terbagi beberapa distrik yang sekarang dikenal dengan nama kecamatan. Dahulu untuk menciptakan suasana kerajaan yang kondusif, raja Bone mengangkat kepala distrik dari kerabat raja itu sendiri. Tujuannya untuk meminimalisir pemberontakan atau apapun itu dalam hal melawan pemerintahan. Sehingga pemimpin-pemimpin distrik merupakan pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh raja dan masih merupakan kerabat raja. Dan dalam pelaksanaan tugas, pemimpin distrik ternyata mampu mengemban tugas dengan baik sehingga dihormati dan disegani rakyatnya. Pemimpin distrik mampu mengatasi permasalahan-permasalahan rakyat diwilayah ditempatkannya. Akhirnya

pemimpin distrik itulah yang kemudian diteruskan kepemimpinannya oleh anak cucunya atau garis keturunannya yang dianggap mampu mengemban tugas kepemimpinan selanjutnya. Itulah yang menjadi awal mengapa di tiap desa hingga kecamatan dipimpin oleh kaum bangsawan. Setelah beralih dari kerajaan ke pemerintahan daerah. Awal dari pemerintahan, bukan pemilihan langsung kepala daerah melainkan penunjukan langsung oleh pemerintah. Maka dari itu, ditunjuklah keturunan bangsawan yang telah terbukti mampu memimpin wilayahnya dengan baik.

2. Alasan Kedua Yaitu Kesadaran Kaum Bangsawan Bone

Bangsawan di Kabupaten Bone saat ini sadar betul akan asal-usulnya serta selalu ditanamkan dalam dirinya oleh orangtuanya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya serta menghormati sejarah-sejarah Kabupaten Bone. Kesadaran kaum bangsawan mengingatkan dirinya akan kehebatan warisan dari leluhurnya sehingga ia masih tergolong sebagai kaum yang dihormati yakni bangsawan. Sebagai bangsawan yang dalam darahnya mengalir darah-darah pemimpin, membuat bangsawan termotivasi untuk tetap mempertahankan kehormatannya dengan menganut empat prinsip kebangsawanannya leluhurnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yakni: *lempu, getteng, ada tongeng* dan *temmappasilaiang*. Persoalan pembedaan status kebangsawanannya dan orang biasa atau sistem hirarki ini terkait erat dengan sistem aturan adat maupun pandangan pandangan yang muncul dari orang-orang sulawesi selatan. Perbedaan status, kekuasaan dan kekayaan sangat jelas

kehadirannya dalam masyarakat.adanya pandangan-pandangan khusus mengenai tokoh raja beserta keturunannya. (Ahimsa-Putra, 2008, 2007a, 2007b) Dan karena menyadari ada darah pemimpin dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin berikutnya atau setidaknya tergabung dalam jajaran pemerintahan di Kabupaten Bone. Baik sebagai pejabat birokrasi maupun aparatur/pegawai pemerintah.

3. Alasan Selanjutnya adalah Keyakinan Masyarakat

Bahwa tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat Bone masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya Kabupaten Bone. Bahkan sekarang ini, Bone bukan lagi kerajaan namun masyarakat dengan pemikiran tradisional masih mempercayai aturan-aturan kerajaan. Salah satunya pemilihan pemimpin. Menurut keyakinan masyarakat, pemerintah tertinggi di Kabupaten Bone haruslah dari golongan kaum bangsawan atau keturunan raja-raja terdahulu seperti yang telah ditetapkan *To-Manurung*. Sehingga bagi masyarakat, selama masih ada kaum bangsawan yang pantas menjadi pemimpin, maka itulah yang menjadi pilihan masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat berpikiran semacam ini, namun dalam kenyataannya dan dari hasil penelitian saya dengan wawancara informan dari kalangan masyarakat, ternyata masih ada yang berpandangan demikian.

F. Penutup

Hadir dan mendominasinya bangsawan dalam Birokrasi di Kabupaten Bone, serta mampu tercipta eksistensi Bangsawan dalam Birokrasi di Kabupaten Bone ternyata disebabkan oleh strategi

Bangsawan itu sendiri. Dan berdasarkan penelitian strategi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi itu diantaranya sebagai Warisan strategi leluhur, berupa pengangkatan kepala distrik yang merupakan kerabat dari raja bone. Yang terkadang masih dicontoh oleh pejabat birokrasi dalam memilih pejabat birokrasi lainnya namun tetap dengan pertimbangan pemenuhan syarat dan aturan.Strategi selanjutnya yaitu kesadaran kaum bangsawan, yang menyadari dirinya memiliki garis keturunan dari pemimpin yang terhormat dan disegani sehingga termotivasi untuk mengikuti jejak langkahnya. Dengan menganut pula prinsip kebangsawanannya untuk dijadikan pedoman dalam hidupnya sehingga kehormatan dan mampu disegani sebagai kaum bangsawan tetap dimilikinya.

Motivasi tersebut juga menjadikan bangsawan untuk selalu tampil unggul dibandingkan masyarakat yang lainnya dalam segala aspek penilaian kehidupan sehari-hari, seperti Pendidikan, Kekayaan, jabatan, serta Kehormatan Perilaku dalam lingkungan sosialnya.Strategi selanjutnya yaitu keyakinan masyarakat, hadirnya keadilan dan kemakmuran di Bone diawali dengan hadirnya *To Manurung* yang menjadi Bangsawan dan Raja Pertama. Dengan kata lain, Bangsawan merupakan pelopor keadilan dan kemakmuran di Kabupaten Bone sehingga terciptalah kebiasaan dan keyakinan untuk senantiasa mempercayai bangsawan dan menghormati bangsawan di Kabupaten Bone.

Referensi

Ahimsa-Putra, H.S., 2008. Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal: Tantangan Teoritis dan Metodologis.

- Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Ahimsa-Putra, H.S., 2007a. Paradigma, Epistemologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya (Sebuah Pemetaan). Makalah disampaikan dalam pelatihan "Metodologi Penelitian", diselenggarakan oleh CRCS-UGM, di Yogyakarta 12.
- Ahimsa-Putra, H.S., 2007b. Patron & Klien di Sulawesi Selatan Sebuah Kajian Fungsional-Struktural. Yogyakarta: Kepel Press.
- Hamid, A., 2007. Sejarah Bone. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Bone.
- HN, 2019. Sadar Akan Asal-usulnya.
- Makkelo, I.D., n.d. Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan: Makassar sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950. SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities 2, 315-333.
- Mappangara, S., 1996. Kerajaan Bone Abad XIX: Konflik Kerajaan Bone-Belanda, 1816-1860. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mappangara, S., Abbas, I., 2003. Sejarah Islam Di Sulawesi Selatan. Makassar. Lamacca Press.
- Mattulada, 1998. Sejarah, masyarakat, dan kebudayaan Sulawesi Selatan. Hasanuddin University Press.
- Mattulada, 1994. Lingkungan hidup manusia. Pustaka Sinar Harapan.
- Mattulada, 1975. Latoa: satu lukisan analitis terhadap antropologi-politik orang Bugis:(a descriptive analysis of the political anthropology of the Buginese). Universitas Indonesia.
- Patunru, A.D., 1989. Sejarah Bone. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, E.L., Mappangara, S., 2003. Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan. Makassar: Balitbangda Pemprov Sulawesi Selatan.